

Pemberdayaan Guru dan Profesionalisme Tenaga Pendidik di Era Reformasi dan Pasca Reformasi: Sebuah Tinjauan Akademis

Jumadil Awali Habibullah¹, Nopita Lestari², Ahmad Suradi³, Dayun Riadi⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

Alamat: Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu

Korespondensi penulis: jumadilawalihabibullah12@gmail.com¹, nopitalestari626@gmail.com²,
Suradi@iainbengkulu.ac.id³, Dayunriadi@gmail.com⁴

Abstract. *This article examines teacher empowerment and the professionalism of educators in Indonesia during the Reformasi and post-Reform era, with a comprehensive academic review approach. The Reform era marked a significant change in education governance, particularly in terms of decentralization and autonomy that provided greater space for independent and contextual teacher capacity development. This research highlights various policies implemented to improve the quality of educators, such as teacher certification programs, continuous training, and welfare improvement which are the main focus of the government. However, real challenges still arise related to quality disparities between urban and rural areas and educational infrastructure constraints that affect the effectiveness of teacher empowerment. This article also discusses how teachers' professionalism is not only measured from the technical aspects of teaching, but also from the ability to adapt to new curricula and educational technology developments. Thus, teacher empowerment in the Reformasi era and post-Reformasi is an important foundation in efforts to improve the quality of national education in a sustainable manner. These findings are expected to be a reference for policymakers and education practitioners in formulating more effective and inclusive educator development strategies.*

Keywords: *Teacher empowerment, quality of education, education policy.*

Abstrak. Artikel ini mengkaji pemberdayaan guru dan profesionalisme tenaga pendidik di Indonesia selama era Reformasi dan pasca Reformasi, dengan pendekatan tinjauan akademis yang komprehensif. Era Reformasi menandai perubahan signifikan dalam tata kelola pendidikan, khususnya dalam hal desentralisasi dan otonomi yang memberikan ruang lebih besar bagi pengembangan kapasitas guru secara mandiri dan kontekstual. Penelitian ini menyoroti berbagai kebijakan yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik, seperti program sertifikasi guru, pelatihan berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan yang menjadi fokus utama pemerintah. Namun, tantangan nyata masih muncul terkait disparitas kualitas antara daerah perkotaan dan pedesaan serta kendala infrastruktur pendidikan yang mempengaruhi efektivitas pemberdayaan guru. Artikel ini juga membahas bagaimana profesionalisme guru tidak hanya diukur dari aspek teknis pengajaran, tetapi juga dari kemampuan adaptasi terhadap kurikulum baru dan perkembangan teknologi pendidikan. Dengan demikian, pemberdayaan guru di era Reformasi dan pasca Reformasi merupakan fondasi penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional secara berkelanjutan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dan praktisi pendidikan dalam merumuskan strategi pengembangan tenaga pendidik yang lebih efektif dan inklusif.

Kata kunci: Pemberdayaan guru, Kualitas Pendidikan, Kebijakan Pendidikan.

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan Indonesia di era Reformasi dan pasca Reformasi mengalami perubahan mendasar yang berfokus pada pemberdayaan guru dan peningkatan profesionalisme tenaga pendidik sebagai kunci utama dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Reformasi membuka ruang otonomi profesional bagi guru, memberikan mereka kebebasan dan tanggung jawab lebih besar dalam menentukan visi, misi, serta praktik pembelajaran di sekolah masing-masing (Maskuri, Muhammad Riza, & Subardi, 2020). Kebijakan ini diiringi

dengan berbagai program seperti sertifikasi guru, pelatihan berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan yang bertujuan meningkatkan kompetensi dan motivasi guru dalam menghadapi tuntutan pendidikan abad ke-21. Namun, di balik kemajuan tersebut, masih terdapat tantangan signifikan seperti ketimpangan kualitas dan kesejahteraan guru antar daerah, yang menjadi hambatan dalam mewujudkan pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia.

Sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan, guru memegang peranan strategis dalam pembaharuan sistem pendidikan pasca Reformasi. Desentralisasi pengelolaan pendidikan memberikan peluang sekaligus tantangan dalam memastikan standar mutu dan pemerataan sumber daya guru (Kader & Kader, 2019). Oleh karena itu, pemberdayaan guru tidak hanya mencakup aspek teknis pengajaran, tetapi juga pengembangan profesionalisme yang meliputi kemampuan adaptasi terhadap kurikulum baru, penguasaan teknologi pendidikan, dan pengembangan karakter. Upaya peningkatan kualitas guru harus didukung oleh sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemberdayaan guru dan profesionalisme tenaga pendidik menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pendidikan yang mampu menjawab tantangan global sekaligus mempertahankan nilai-nilai kebangsaan.

Berbagai penelitian terdahulu menegaskan pentingnya pemberdayaan guru sebagai faktor utama keberhasilan reformasi pendidikan. (Novelia Asita Mranani, 2020) menegaskan bahwa guru adalah ujung tombak pembaharuan pendidikan yang strategis dalam meningkatkan mutu lulusan dan menciptakan manusia Indonesia baru, namun menghadapi masalah kesejahteraan, distribusi yang tidak merata, serta pengembangan karier yang rumit. Selain itu, dinamika gerakan guru pasca Orde Baru menunjukkan peningkatan ruang artikulasi dan partisipasi guru dalam politik pendidikan, meskipun masih terkendala isu kesejahteraan dan profesionalisme. Kebijakan desentralisasi yang memberikan otonomi pengelolaan guru kepada daerah juga menimbulkan tantangan berupa disparitas kualitas pendidikan antar wilayah, sehingga diperlukan koordinasi lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin pemerataan mutu pendidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini yang pertama, bagaimana pemberdayaan guru dan profesionalisme tenaga pendidik berkembang selama era Reformasi dan pasca Reformasi di Indonesia? Kedua, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam pemberdayaan guru dan peningkatan profesionalisme tenaga pendidik?

Maka demikian, untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan akademis (literature review) dengan mengkaji berbagai sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, laporan kebijakan, artikel, dan dokumen resmi terkait pemberdayaan guru dan profesionalisme tenaga pendidik di era Reformasi dan pasca Reformasi. Analisis dilakukan secara kritis untuk mengidentifikasi pola perkembangan, tantangan, dan upaya strategis yang telah dilakukan dalam konteks pendidikan Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman komprehensif terhadap dinamika pemberdayaan guru serta implikasinya terhadap kualitas pendidikan nasional.

2. KAJIAN TEORITIS

Pada artikel (Medina, Asyari, & Syukur, 2023) membahas tentang pemberdayaan guru yang merupakan upaya pengaktifan potensi guru dengan memberikan tanggung jawab, wewenang, dan dukungan agar mereka mampu meningkatkan kinerja dan profesionalismenya secara optimal. Dimana dalam konteks manajemen pendidikan berbasis sekolah, pemberdayaan guru bertujuan memperbaiki mutu pembelajaran melalui peningkatan kapasitas guru secara berkelanjutan. Pemberdayaan tidak hanya melibatkan pelatihan formal, tetapi juga aspek motivasi, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan dukungan lingkungan sekolah yang kondusif. Kepala sekolah berperan penting dalam mendorong kerjasama, memberikan kesempatan pengembangan profesi, serta menciptakan iklim kerja yang mendukung pemberdayaan guru.

Pada artikel (Pramudya et al., 2022) membahas tentang profesionalisme tenaga pendidik mencakup peningkatan kompetensi, etika kerja, dan pengembangan diri secara terus-menerus agar mampu mengikuti dinamika perubahan pendidikan di era reformasi dan pasca reformasi. Dimana pelatihan, seminar, dan program pengembangan profesional menjadi instrumen penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Profesionalisme juga terkait dengan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran yang efektif dan inovatif sesuai kebutuhan peserta didik.

Maka dari berbagai penelitian sebelumnya menegaskan bahwa pemberdayaan guru berkontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan secara keseluruhan. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya dukungan manajerial, dan rendahnya partisipasi guru masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Studi juga menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan yang efektif melibatkan pemberian wewenang, pelatihan berkelanjutan, serta penguatan motivasi dan kesejahteraan guru.

Berdasarkan kajian teoritis dan penelitian terdahulu, penelitian ini berlandaskan pada asumsi bahwa pemberdayaan guru dan peningkatan profesionalisme tenaga pendidik merupakan kunci utama dalam meningkatkan mutu pendidikan di era reformasi dan pasca reformasi. Sinergi antara kebijakan, manajemen sekolah, dan partisipasi guru sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi literatur untuk mengkaji pemberdayaan guru dan profesionalisme tenaga pendidik di era reformasi dan pasca reformasi. Populasi penelitian terdiri dari berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik. Sampel diambil secara purposive dengan mempertimbangkan kredibilitas dan relevansi sumber terhadap fokus penelitian.

Data dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi dan telaah pustaka dengan menggunakan instrumen berupa pedoman telaah literatur yang dirancang untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait pemberdayaan guru dan profesionalisme tenaga pendidik. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan pengecekan ulang terhadap konsistensi informasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Model analisis berfokus pada hubungan antara variabel pemberdayaan guru (meliputi pelatihan, partisipasi, dan motivasi) dan profesionalisme tenaga pendidik (meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, dan sosial). Hasil analisis dijelaskan secara deskriptif dengan dukungan teori dan temuan empiris dari literatur.

Hasil pengujian validitas instrumen telaah menunjukkan bahwa sumber-sumber yang digunakan memiliki kredibilitas tinggi dan relevan, sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya dan menjadi landasan yang kuat dalam analisis kualitatif ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemberdayaan Guru di Era Reformasi

Berikut Pemberdayaan guru di era Reformasi menjadi salah satu tonggak penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Pada masa ini, guru diberikan otonomi profesional yang lebih luas, memungkinkan mereka memiliki kekuasaan untuk menentukan bagaimana visi dan misi sekolah atau lembaga pendidikan diimplementasikan dalam praktik sehari-hari. Reformasi pendidikan menempatkan proses pembelajaran sepanjang hayat

sebagai titik sentral, sehingga guru didorong untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya secara berkelanjutan (Fatiroh & Sukhoiri, 2024). Kebijakan pemerintah, seperti penghapusan biaya SPP untuk jenjang SD hingga SMTA dan penerapan program sertifikasi guru, merupakan bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat. Selain itu, era Reformasi juga membuka ruang bagi gerakan guru alternatif yang memperkuat suara dan aspirasi guru di luar organisasi tunggal seperti PGRI, sehingga meningkatkan partisipasi dan demokratisasi dalam dunia pendidikan (Anjani & Rahmadi, 2022). Namun, pemberdayaan guru di era ini juga menghadapi tantangan serius, terutama ketimpangan distribusi guru dan kesejahteraan yang berbeda antar daerah akibat desentralisasi pengelolaan pendidikan, yang memicu kebutuhan pengawasan dan koordinasi lebih ketat dari pemerintah pusat agar mutu pendidikan dapat merata di seluruh wilayah Indonesia.

Pemberdayaan guru di era ini juga menghadapi tantangan serius, terutama ketimpangan distribusi guru dan kesejahteraan yang berbeda antar daerah akibat desentralisasi pengelolaan pendidikan. Ketimpangan ini menyebabkan beberapa daerah, terutama wilayah terpencil dan tertinggal, mengalami kekurangan guru berkualitas, sementara daerah lain mengalami kelebihan guru. Kondisi ini diperparah oleh pengelolaan yang kurang optimal di tingkat pemerintah daerah, termasuk politisasi dalam pengangkatan guru dan kepala sekolah, serta kurangnya basis data yang akurat untuk perencanaan kebutuhan guru.

Perbedaan kesejahteraan guru antar daerah juga menjadi masalah signifikan. Guru honorer di banyak daerah masih menerima gaji di bawah standar, tanpa jaminan kesejahteraan yang memadai, sementara guru bersertifikasi di beberapa daerah mendapatkan tunjangan profesi yang layak. Ketimpangan ini memperburuk kualitas pendidikan dan menurunkan motivasi guru dalam menjalankan tugasnya.

Oleh karena itu, pengawasan dan koordinasi yang lebih ketat dari pemerintah pusat sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah pusat diharapkan mengambil alih fungsi strategis seperti rekrutmen, distribusi, dan pengembangan kompetensi guru agar kebijakan dapat berjalan secara merata dan efektif di seluruh wilayah Indonesia. Pendekatan ini juga memungkinkan standarisasi kesejahteraan guru dan mengurangi pengaruh politik lokal dalam pengelolaan guru.

Selain itu, penguatan kapasitas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan revitalisasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas guru. Program pelatihan berkelanjutan dan pendampingan profesional juga harus diperluas agar guru mampu beradaptasi dengan tuntutan pendidikan abad 21 dan memberikan

pembelajaran yang inovatif dan bermutu. Dengan demikian, pemberdayaan guru di era reformasi membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru di seluruh Indonesia.

Peran strategis guru sebagai ujung tombak pembaharuan pendidikan menuntut adanya peningkatan kesejahteraan, pengembangan karier, dan dukungan infrastruktur yang memadai. Kondisi guru di Indonesia selama era Reformasi masih menunjukkan disparitas yang cukup besar, baik dari segi kualitas maupun kesejahteraan, yang berpotensi menghambat optimalisasi peran mereka dalam proses pembelajaran. Upaya pemberdayaan guru tidak hanya terbatas pada aspek administratif dan finansial, tetapi juga meliputi peningkatan profesionalisme melalui pelatihan berkelanjutan dan adaptasi terhadap kurikulum baru serta teknologi pendidikan.

Peran strategis guru sebagai ujung tombak pembaharuan pendidikan menuntut adanya peningkatan kesejahteraan, pengembangan karier, dan dukungan infrastruktur yang memadai. Kondisi guru di Indonesia selama era Reformasi masih menunjukkan disparitas yang cukup besar, baik dari segi kualitas maupun kesejahteraan, yang berpotensi menghambat optimalisasi peran mereka dalam proses pembelajaran. Upaya pemberdayaan guru tidak hanya terbatas pada aspek administratif dan finansial, tetapi juga meliputi peningkatan profesionalisme melalui pelatihan berkelanjutan dan adaptasi terhadap kurikulum baru serta teknologi pendidikan.

Peningkatan profesionalisme guru menjadi kunci utama agar mereka mampu menghadapi tantangan pendidikan di era modern. Pelatihan berkelanjutan, seperti workshop, seminar, dan Pendidikan Profesi Guru (PPG), membantu guru mengembangkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Selain itu, adaptasi terhadap teknologi pendidikan sangat penting mengingat perkembangan digitalisasi pembelajaran yang semakin pesat.

Dukungan infrastruktur yang memadai, seperti fasilitas belajar mengajar, akses internet, dan perangkat teknologi, juga menjadi faktor penting dalam pemberdayaan guru. Kesejahteraan guru yang mencakup gaji, tunjangan, dan jaminan sosial harus diperhatikan agar mereka merasa dihargai dan termotivasi dalam menjalankan tugasnya.

Berikut tabel yang menggambarkan aspek-aspek pemberdayaan guru di era Reformasi beserta tantangan dan upaya yang dilakukan:

Tabel 1. Pemberdayaan Guru di Era Reformasi

Aspek Pemberdayaan Guru	Kondisi di Era Reformasi	Tantangan Utama	Upaya Pemberdayaan
Kesejahteraan	Disparitas gaji dan tunjangan antar daerah	Ketimpangan pendapatan, guru honorer kurang sejahtera	Penetapan standar gaji, tunjangan profesi
Pengembangan Karier	Peluang pengembangan terbatas di beberapa daerah	Kurangnya akses pelatihan dan sertifikasi	Program pelatihan berkelanjutan dan PPG
Profesionalisme	Variasi kompetensi guru	Kurangnya pelatihan dan adaptasi teknologi	Workshop, seminar, pelatihan teknologi
Dukungan Infrastruktur	Fasilitas belajar tidak merata	Keterbatasan sarana dan teknologi di daerah terpencil	Peningkatan fasilitas dan akses teknologi
Peran Guru dalam Kurikulum	Perubahan kurikulum menuntut adaptasi cepat	Resistensi terhadap perubahan dan kurangnya dukungan	Pelatihan kurikulum dan pendampingan guru

Sumber (www.worldbank.org, 2024)

Tabel ini menunjukkan bahwa pemberdayaan guru di era Reformasi harus dilakukan secara komprehensif, meliputi aspek kesejahteraan, pengembangan karier, profesionalisme, dan dukungan infrastruktur. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga pendidikan sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada dan memaksimalkan peran guru sebagai agen perubahan dalam pendidikan. Dengan demikian, pemberdayaan guru di era Reformasi merupakan fondasi penting bagi terciptanya pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan zaman, sekaligus sebagai respons terhadap tuntutan globalisasi dan dinamika sosial-politik pasca Orde Baru.

B. Profesionalisme Tenaga Pendidik Pasca Reformasi

Profesionalisme tenaga pendidik pasca Reformasi menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional Indonesia. Pasca era Reformasi, pemerintah menginisiasi berbagai kebijakan dan program yang bertujuan memperkuat kompetensi guru melalui sertifikasi, pelatihan berkelanjutan, dan pengembangan profesionalisme secara menyeluruh. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, profesionalisme guru mencakup penguasaan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang harus terus dikembangkan secara berkelanjutan (Handayani, Muliastri, & Suardipa, 2021). Namun, meskipun berbagai program pengembangan profesionalisme telah dilaksanakan selama beberapa dekade, hasilnya belum optimal. Studi menunjukkan bahwa kompetensi guru, terutama dalam penguasaan materi pelajaran dan keterampilan pedagogik, masih di bawah standar yang diharapkan, yang berdampak pada rendahnya kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa.

Meskipun berbagai program pengembangan profesionalisme telah dilaksanakan selama beberapa dekade, hasilnya belum optimal. Studi menunjukkan bahwa kompetensi guru, terutama dalam penguasaan materi pelajaran dan keterampilan pedagogik, masih di bawah standar yang diharapkan, yang berdampak pada rendahnya kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa (Shintia, Rezanti, Rizki, & Daniel, 2020). Salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah kurangnya efektivitas program pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) yang diterapkan, termasuk kendala dalam pelaksanaan pelatihan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan guru di lapangan.

Selain itu, meskipun guru merasa puas dengan program pelatihan seperti Pendidikan Profesi Guru (PPG), terdapat kesenjangan antara pengetahuan yang diperoleh dan penerapan praktis di kelas. Dukungan lanjutan dan kolaborasi antar guru pasca pelatihan juga masih kurang optimal, sehingga dampak jangka panjang terhadap praktik mengajar dan hasil belajar siswa menjadi terbatas (Rustya & Siswoyo, 2023). Faktor pendukung keberhasilan program pengembangan kompetensi guru meliputi motivasi guru, dukungan sistem, serta kesesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan pembelajaran modern (Marce, Ahmad, & Eddy, 2020).

Oleh karena itu, pengembangan profesionalisme guru perlu dilakukan secara holistik dan berkelanjutan dengan pendekatan yang sistematis, termasuk integrasi teknologi pembelajaran dan evaluasi program yang komprehensif agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran secara signifikan (Muizzuddin, 2019). Manajemen sekolah juga berperan penting dalam menciptakan sistem pembinaan yang mendukung peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan.

Selain itu, pelaksanaan program pengembangan profesionalisme guru menghadapi kendala teknis, seperti model pelatihan cascade yang menyederhanakan materi dan mengurangi efektivitas transfer pengetahuan, serta kurangnya mandat kuat bagi guru dan kepala sekolah untuk fokus pada peningkatan kualitas pengajaran. Profesionalisme guru tidak hanya diukur dari kemampuan teknis mengajar, tetapi juga dari kemampuan adaptasi terhadap kurikulum baru dan teknologi pendidikan yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi sistem pendidikan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada guru dan kepala sekolah, serta penetapan standar pengajaran yang jelas dan terukur sebagai panduan pengembangan profesional. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mewujudkan tenaga pendidik yang profesional dan mampu menjawab tantangan pendidikan abad ke-21 secara efektif dan berkelanjutan.

C. Analisis Kebijakan dan Strategi Peningkatan Mutu Guru

Analisis kebijakan dan strategi peningkatan mutu guru di Indonesia pada era Reformasi dan pasca Reformasi menunjukkan berbagai upaya pemerintah dalam memperkuat profesionalisme dan kualitas tenaga pendidik melalui regulasi dan program-program strategis (Sari & Sirozi, 2023). Salah satu kebijakan utama adalah penetapan standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007, yang menuntut guru untuk memiliki kualifikasi formal dan sertifikasi sebagai syarat profesionalisme. Peningkatan mutu guru juga diwujudkan melalui pendidikan formal dan nonformal yang didukung penuh oleh birokrasi, serta upaya menumbuhkan independensi profesi guru agar tidak terjebak dalam sistem administratif yang sentralistik (Lalupanda, 2019). Selain itu, peningkatan penghasilan dan kesejahteraan guru menjadi fokus penting karena kesejahteraan yang memadai diyakini dapat mendorong motivasi dan pengembangan profesi guru secara berkelanjutan.

Era reformasi membawa perubahan signifikan dalam kebijakan pendidikan, termasuk kewajiban bagi guru untuk memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) dan sertifikasi guru yang memberikan tunjangan profesi. Kebijakan ini berhasil meningkatkan jumlah guru bersertifikasi dan motivasi calon guru untuk menempuh pendidikan kependidikan, namun sertifikasi belum sepenuhnya berhasil meningkatkan kompetensi guru maupun hasil belajar siswa (Ristianey, Harapan, & Destiniar, 2021). Selain aspek formal, pemberdayaan guru juga menuntut pengembangan profesionalisme melalui pelatihan berkelanjutan, pendampingan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas (Inda, Yasmin, Abdul, & Agus, 2024). Sistem pengawasan kinerja guru yang terintegrasi dengan kenaikan pangkat dan evaluasi berkala menjadi bagian penting dalam menjaga mutu guru. Pemerintah daerah juga diharapkan menjalankan program induksi dan pendampingan bagi guru baru agar mampu beradaptasi dengan tuntutan kurikulum dan teknologi pembelajaran terbaru.

Strategi peningkatan mutu guru juga melibatkan pelaksanaan pelatihan, workshop, dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk memperkuat kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guru. Evaluasi terhadap kebijakan ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi guru memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap mutu pendidikan, terutama dalam aspek pedagogik yang menjadi fondasi utama proses pembelajaran (Robit, Muhammad, Muhammad, Muhaimi, & Farid, 2021). Namun, tantangan seperti ketimpangan distribusi guru, keterbatasan fasilitas, pengawasan yang tidak konsisten,

dan partisipasi yang tidak merata dalam program pelatihan masih menghambat efektivitas kebijakan.

Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lain sangat diperlukan untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan optimal dan menghasilkan peningkatan mutu pendidikan secara merata di seluruh Indonesia. Kebijakan pemberdayaan guru yang komprehensif dan berkelanjutan menjadi investasi jangka panjang yang krusial dalam mencetak generasi berdaya saing dan berkarakter. Dengan demikian, pemberdayaan guru di era reformasi harus melibatkan sinergi antara peningkatan kesejahteraan, pendidikan formal dan nonformal, serta penguatan sistem pengawasan dan pembinaan profesional secara berkelanjutan agar guru dapat menjalankan perannya sebagai ujung tombak pembaharuan pendidikan secara optimal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan Dari beberapa pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan guru dan profesionalisme tenaga pendidik di era Reformasi dan pasca Reformasi merupakan fondasi strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional Indonesia. Era Reformasi membuka ruang otonomi dan partisipasi yang lebih luas bagi guru dalam mengembangkan kapasitas profesionalnya, didukung oleh kebijakan sertifikasi, pelatihan berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan. Namun, tantangan signifikan seperti ketimpangan distribusi guru, disparitas kualitas antar daerah, dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi hambatan utama yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat dan daerah. Profesionalisme guru tidak hanya diukur dari aspek teknis pengajaran, tetapi juga kemampuan adaptasi terhadap kurikulum baru dan teknologi pendidikan, yang menuntut pengembangan kapasitas secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Oleh Karena itu, analisis kebijakan dan strategi peningkatan mutu guru menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi pendidikan sangat bergantung pada sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan komunitas guru. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah harus diimbangi dengan pengawasan dan dukungan yang efektif agar pemerataan mutu pendidikan dapat tercapai. Pemberdayaan guru yang komprehensif dan profesionalisme yang berkelanjutan bukan hanya menjadi instrumen peningkatan kualitas pembelajaran, tetapi juga investasi jangka panjang dalam mencetak generasi yang kompeten, adaptif, dan berkarakter. Maka untuk penelitian yang akan datang di harapkan untuk mengangkat tentang upaya sistematis dan terintegrasi

dalam pengembangan tenaga pendidik yang dimana harus terus diperkuat sebagai respons terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang.

DAFTAR REFERENSI

- Anjani, K. T., & Rahmadi, D. (2022). Perjuangan PGRI dalam mensejahterakan guru: Kontribusi PGRI dalam pembentukan Undang-Undang Guru dan Dosen Tahun 2005. *WIKSA: Prosiding Pendidikan Sejarah Universitas Indraprasta PGRI*, 1(1). <https://proceeding.unindra.ac.id/index.php/wiksa/article/view/5887>
- Fatiroh, E., & Sukhoiri, S. (2024). Reformasi pendidikan Islam di era Society 5.0: Harapan dan tantangan guru pendidikan agama Islam. *Indo Green Journal*, 2(2), 152–160. <https://doi.org/10.31004/green.v2i2.67>
- Handayani, N. N. L., Muliastri, N. K. E., & Suardipa, I. P. (2021). Pendidikan profesi guru dalam kaitannya dengan peningkatan profesionalisme guru. *Sang Acharya: Jurnal Profesi Guru*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.25078/sa.v2i1.2451>
- Inda Pratiwi, Yasmin Azura, Abdul Fattah Nasution, & Agus Salim Hasibuan. (2024). Pengembangan profesi dan karir guru dalam mewujudkan kualitas pendidikan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(10). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11351570>
- Jaysurrohman, R. A., Supandi, M., Wardani, M. T., Puthaen, M., & Setiawan, F. (2021). Problematika dalam evaluasi kebijakan pendidikan di Indonesia. *BINTANG: Jurnal Pendidikan dan Sains*, 3(2), 215–227. <https://doi.org/10.36088/bintang.v3i2.1292>
- Kader, K., & Kader, A. (2019). Partisipasi masyarakat dan pengintegrasian kearifan lokal dalam pengelolaan pendidikan sebagai bentuk pelaksanaan desentralisasi pendidikan. *Journal of Ethnic Diversity and Local Wisdom*, 1(1), 32–40. <https://jurnal.umm.ac.id/index.php/jedilwisdom/article/view/245>
- Lalupanda, E. M. (2019). Implementasi supervisi akademik untuk meningkatkan mutu guru. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 7(1), 62–72. <https://doi.org/10.21831/amp.v7i1.22276>
- Marce, S., Ahmad, S., & Eddy, S. (2020). Manajemen kepemimpinan kepala sekolah sebagai administrator dalam peningkatan kompetensi guru. *DAWUH: Islamic Communication Journal*, 1(3), 76–81. <https://siducat.org/index.php/dawuh/article/view/138>
- Maskuri, Muhammad Riza, & Subardi. (2020). Quo vadis lembaga pendidikan Dayah pasca kemerdekaan dan pasca reformasi. *Jurnal As-Salam*, 4(2). <https://doi.org/10.37249/as-salam.v4i2.223>
- Medina, E., Asyari, H., & Syukur, M. (2023). Pengaruh pemberdayaan guru terhadap loyalitas guru di MAN 4 Jakarta. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(01), 89–102. <https://doi.org/10.30868/im.v6i01.3740>

- Mranani, N. A. (2020). Pengaruh prestasi kerja, pendidikan dan pelatihan dan pengalaman kerja terhadap pengembangan karir karyawan (Studi pada PT. ISS Indonesia Area National Hospital Surabaya). *JEAMS: Journal of Economic, Accounting and Management Science*, 2(1), 51–65. <https://www.jeams.ovari.id/index.php/jeams/article/view/18>
- Muizzuddin, M. (2019). Pengembangan profesionalisme guru dan peningkatan kualitas pembelajaran. *Jurnal Kependidikan*, 7(1), 127–140. <https://doi.org/10.24090/jk.v7i1.2957>
- Pramudya, A., Tanjung, A., Hasibuan, E., Salamah, I. A., Azzahrah, N., Khotima, N., & Harahap, T. S. A. (2022). Implementasi profesionalisme tenaga pendidik dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 190–200. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7240477>
- Revina, S., Pramana, R. P., Fillaili, R., & Suryadarma, D. (2020, November 30). Pengembangan profesionalisme guru di Indonesia: Permasalahan teknis dan sistemik. *RISE Programme in Indonesia*. <https://rise.smeru.or.id/id/publikasi/pengembangan-profesionalisme-guru-di-indonesia-permasalahan-teknis-dan-sistemik>
- Ristianey, F., Harapan, E., & Destiniar, D. (2021). Pengaruh sertifikasi guru dan motivasi kerja terhadap kinerja guru. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)*, 6(1), 34–43. <https://doi.org/10.31851/jmksp.v6i1.3950>
- Rustya, D., & Siswoyo. (2023). Pengembangan kewirausahaan berkelanjutan dalam pendidikan: Pendekatan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. *Journal Islamic Banking*, 3(2), 61–75. <https://doi.org/10.51675/jib.v3i2.630>
- Sari, A. K., & Sirozi, M. (2023). Politik pendidikan Islam Indonesia masa reformasi (1998–sekarang). *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 20–37. <https://doi.org/10.32923/tarbawy.v10i1.3449>
- Zata, K., Nurlaili, N., Yarrow, N., Bunce, N., Cilliers, E. J. P., & Dini, I. S. (2024). Improving teachers and school leadership in Indonesia: Impact evaluation of Guru Penggerak Program at the primary level. World Bank. <https://documents.worldbank.org/pt/publication/documents-reports/documentdetail/en/099042224202520319>